

Karya Ilmiah

Partai Politik Islam Indonesia antara Pilihan politik dan Ideologi



Nama : Syafiuddin Fadlillah
NIDN. : [0318067702](#)

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Al-azhar Indonesia

2019

Partai Politik Islam Indonesia Antara Pilihan Politik dan Ideologi

Syafiuddin Fadlillah¹

Abstract

Islamic political parties in Indonesia have a very strong historical roots and a long history. It has been used to strengthen but it is now fragile and weak. Although the majority of Indonesia's population is also strengthening the spirituality of Islam and its adherents worshipper, it does not strengthening the Islamic political parties and the party remained stable in the middle level. Several factors that weakening the Islamic political parties are secularism that entrenched in the country, the lack of regeneration in Indonesian Islamic party, lack of ideal Muslim political figures, and cases of radicalism. All these factors lead Islamist political parties are very difficult to disengage themselves from the pragmatism of interests and eventually ignore the ideology of Islam.

Keywords : *Indonesian Islamic political parties, pragmatic interest, Islamic ideology, Setbacks*

Pendahuluan

Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia², karenanya dalam pergulatan politik nasional, Islam adalah salah satu kekuatan politik yang tidak bisa dihilangkan, H. Faith dalam analisa politiknya memasukan Islam sebagai kekuatan yang memerankan peranan penting dalam peta politik Indonesia³, sebelum kemerdekaan misalnya ada nama-nama tokoh politik perjuangan muslim yang bisa disebut, seperti Diponogoro, Imam Bonjol dan seterusnya, sesudah kemerdekaan ada tokoh penting muslim seperti M. Natsir, M. Roem dan seterusnya, namun dalam perjalanan politiknya, partai politik Islam mengalami masa pasang surut, Deliar Noer menyebut Islam secara politik mengalami pasang surut dipentas nasional, pasang pada saat awal kemerdekaan hingga munculnya demokrasi terpimpin, namun kekuatan Islam kemudian mengalami kekalahan dengan munculnya pancasila sebagai dasar negara, kekalahan kelompok Islam dalam menggolkan Islam sebagai dasar negara disebabkan karena perolehan suara partai politik Islam yaitu Masyumi dan NU kurang dari 45 persen yang berarti kekuatan kelompok Islam ini tak akan bisa melakukan

¹ Ketua CIMES (Center of Islam and Middle East Studies) Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia

² BPS 2011 menyebut penduduk Indonesia sekitar diatas 80 % nya adalah muslim

³ Partisipasi Politik, Miriam Budiardjo, 1980, Obor, Jakarta

perubahan UUD yang mensyaratkan dua pertiga anggota harus menyetujui perubahan undang-undang⁴.

Setelah demokrasi dipimpin kekuatan politik Islam dipentas nasional mengalami kemunduran dan terus surut memudar, pada era orde baru kekuatan politik Islam turun hingga pada titik yang sangat rendah yang ditandai dengan lenyapnya institusi politik Islam dengan PPP mengakui asas tunggal dan menghilangkan ideology Islam, kondisi politik Islam yang begitu sangat rendah ini disebabkan banyak factor diantaranya adalah birokratisasi politik, yaitu campur tangan pemerintah dalam kebijakan politik, pemerintah tidak menerima simbol-simbol agama dalam partai politik seperti pada tahun 1968 Parmusi didirikan, sebagian tokohnya ditolak oleh pemerintah karena berasal dari kader Masyumi, M. Hatta juga ingin mendirikan Partai Demokrasi Islam namun mendapat pertentangan dari pemerintah orde baru hingga akhirnya pemerintah melakukan kebijakan memfusi semua partai politik Islam yang melahirkan PPP pada tahun 1973⁵. di era reformasi dengan munculnya banyak partai politik Islam, Lili Romli mencatat ada 42 partai politik Islam yang muncul ketika keran reformasi terbuka namun yang berhasil ikut pemilu hanya ada 17 partai politik Islam, Lili membagi partai politik Islam yang muncul dalam tiga kategori Islam Tradisionalist, Islam Modernis dan Islam Fundamentalis⁶. Dari 17 partai politik Islam ini hanya 8 partai politik Islam saja yang mendapat kursi di DPR yaitu PPP, PBB, PK, Partai Nahdatul Ummat, Partai Kebangkitan Umat, Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)⁷, jika dikalkulasi secara perolehan suara maka partai politik Islam tidak pernah menjadi pemenang dipemilu Indonesia sejak pemilu pertama 1955 hingga pemilu 2009.

Masalah dan pertanyaan penelitian

Saiful Mujani menyebut bahwa kekuatan Islam secara *civil society* yang relative kuat tidak otomatis langsung membuat Islam secara politikpun kuat, itulah yang disampaikannya dalam desertasinya yang mengukur tingkat kedekatan umat Islam secara kultur seperti membaca Quran, salat, puasa dan menghadiri majlis taklim

⁴ Islam yes, partai Islam yes, Lili Romli, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

⁵ Islam Orde Baru, perubahan politik dan keagamaan, Sudirman Tebba, 1993, Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta

⁶ Lili Romli, Partai Politik Islam di era Reformasi dan piagam Jakarta dalam siding tahunan MPR 2000, 2001, Tesis Universitas Indonesia

⁷ Hamdan Zoelva, Partai politik islam dalam peta politik Indonesia, makalah di The International Institute of Islamic Thought (IIIT) 17 April 2003

yang tidak secara otomatis mereka akan memilih partai politik berideologikan Islam, pemilu 1955 yang kekuatan Islam sempat pasang dengan masyumi meraih lebih dari 20% dan NU meraih sekitar 16 % namun setelah itu hancur lebur hingga menjelang reformasi, era reformasi kembali Islam menjadi kekuatan yang sedikit mulai bergeliat dengan masuknya PKS dan PPP menjadi *middle party* setelah sebelumnya hanya menjadi partai kecil kebawah, walau pemilu 2009 PPP terperosok ke urutan partai kecil berbeda dengan PKS yang tetap istiqomah di barisan tengah⁸

Kedekatan umat Islam dengan agama tidak berbanding lurus dengan pilihan politiknya yang harus memilih partai politik Islam, saiful mujani mencatat penelitiannya bersama Liddle, 59 % orang Islam rajin baca quran, 83% selalu berdo'a sebelum berangkat kerja, 94-99 % rajin salat, 85-91 % rajin puasa di bulan ramadhan, namun perolehan suara partai politik Islam sejak tahun 1955 hingga kini tak pernah memenangkan pertarungan politik yang dipresentasikan dengan partai politik Islam, pertanyaan penelitiannya adalah mengapa kekuatan politik partai politik Islam tak pernah memenangkan percaturan politik nasional, padahal mayoritas penduduknya adalah muslim dan secara spiritual Islam, muslim Indonesia memiliki tingkat spiritual yang bagus ? inilah pertanyaan yang akan dijawab dalam makalah sederhana ini.

Kerangka Teori

Keberhasilan partai politik dalam pemilu ditentukan oleh dua faktor penting, internal dan eksternal, internal terkait dengan system partai politik mulai dari rekrutmen hingga komunikasi politik, eksternal terakit dengan pandangan orang terhadap partai politik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya pandangan kaum intelektual, agama dan juga kalangan institusi pendidikan.

Karena penelitian ini akan mengukur keberhasilan dan kegagalan sebuah partai politik maka penelitian ini akan menggunakan teori sistem rekrutmen, sistem kepartaian dan juga pemilu dan sistem pemilu

A. Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki empat fungsi penting yaitu, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan artikulasi kepentingan. Keberhasilan sebuah partai politik dalam penggumpulan suara pada pemilihan umum tergantung seberapa kuat partai politik tersebut dan sejauh mana

⁸ Muslim Demokrat, Saiful Mujani, 2007, Gramedia, Jakarta

juga partai menjalankan fungsi-fungsi partai politik yang empat diatas dan partai politik yang kuat haruslah memiliki system partai yang handal sebagaimana Alan Ware menyebut tentang partai politik sehingga bisa memenangkan pemilihan umum, Alan Ware menyebut bahwa partai politik yang kuat adalah partai politik yang memiliki sistem rekrutmen calon kepemimpinan yang kuat dan terukur dengan melibatkan struktur partai dari yang terendah hingga paling tinggi⁹,

Alan Ware kemudian memberikan lima cara menyeleksi kader partai sehingga partai politik menjadi kuat, lima cara itu adalah :

Pertama, seleksi diatur dengan ketentuan dan prosedur yang jelas dan dilaksanakan oleh partai politik itu sendiri, atau bisa juga negara memberikan ketentuan prosedur dan tata cara rekrutmen. Kedua, adanya sistem sentralisasi partai atau juga disentralisasi yang diserahkan kepada lokal partai politik, bisa menggunakan dua cara ini dengan konsisten

Ketiga, pengambil keputusan tidak dilakukan oleh beberapa tokoh partai politik namun keputusan dilakukan oleh banyak kader partai politik yang tersebar diunit-unit partai politik. Keempat, jumlah tempat yang akan diisi oleh kandidat yang sedang diseleksi dalam satu waktu oleh unit pengambil keputusan yang relevan. Kelima, kemudahan untuk para kandiddat yang telah diseleksi kedalam jabatan publik, dapatkah mereka ditarik kembali.

Oleh karena itu kekuatan utama proses seleksi para kandidat yang dikemukakan oleh Ware sesungguhnya terletak pada derajat dan pola relasi kekuasaan yang berlangsung, baik pada tingkat kelembagaan maupun pada aktor aktor yang terlibat, jika ini yang dianalisa seharusnya fokus perhatian bukannya pada persoalan kuantitas aktor melainkan tetapi seberapa besar kekuasaan yang dipunyai oleh aktor tersebut.

B. Pemilu dan Sistem Pemilu

Roberth Dahl menyebut bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya yang meliputi dua dimensi yaitu : pertama, seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi, atau oposisi yang dimungkinkan, kedua, seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik, pengertian Schumpeter lebih prosedural ia mengatakan, pengetahuan kelembagaan untuk

⁹ Alan Ware, *Political Party and Political System*, 1977, Oxfport.

mencapai keputusan-keputusan politik didalam mana induvidu-induvidu melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan¹⁰

Demokrasi dengan pengertian diatas tidak bisa dilepas dari pemilihan umum, pemilihan umum memiliki tiga fungsi utama, pertama refresentasi (perwakilan) pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih, kedua integrasi pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat bahwa sistem pemilu menuju pembentukan partai politik dan suara mayoritas serta seberapa jauh ini terpenuhi sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu. ketiga keputusan sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah.

Dalam sisitem pemilu dikenal dua macam sistem, pertama sistem distrik dan kedua sisitem proposional, sistem distrik adalah sistem yang didasarkan pada satu wilayah (distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak. Negara dibagi dalam sejumlah besar kecilnya distrik pemilihan yang kira-kira sama dengan jumlah penduduknya, sistem ini mendorong masyarakat ke arah integrasi sistem distrik yang dapat mencegah munculnya partai baru dan karena suara yang diperlukan adalah suara terbanyak untuk membentuk suatu pemerintahan, tanpa harus melakukan koalisi dan kemandirian kabinet akan menunjang stabilitas nasional

Kedua adalah sistem proporsional, adalah sistem satu wilayah (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan atas dasr suatu rasio. Jumlah suara yang diperoleh partai menentukan jumlah kursi diparlemen, artinya adalah bahwa rasio perolehan suara antar partai sama dengan rasio perolehan kursi diparlemen, sistem ini sering dipakai dalam negara dengan banyak partai, sistem ini dianggap lebih demokratis dan refresentatif karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu secara nasional, disamping itu sistem ini dianggap adil karena semua golongan dalam masyarakat termasuk yang kecil sekalipun mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya di parlemen.

Mengacu pada rekrutmen politik dan sistem pemilu diatas maka kedua partai memiliki kesamaan sebagai partai kader dan proses rekrutmennya juga relatif baik demikian juga dengan sistem pemilu yang dipakai, kedua negara relatif menggunakan sistem proporsional, namun mengapa hasil perolehan suaranya berbeda?

¹⁰ Moekhtar Mas'oed dalam Dominasi Golkar dan LDP di Indonesia dan Jepang, Sri Zul Khairiah, 2008, Fisip UI

Dari kajian sementara peneliti, kegagalan partai politik Islam Indonesia disebabkan dan diantaranya terkait relasi Islam dan politik, fakta ini diperkuat oleh tidak terkotaknya umat Islam dalam kotak-kotak yang saling bertentangan, pertentangan relasi negara dan agama yang tertanam kuat dikalangan intelektualnya¹¹, karenanya kelompok salafi yang terkesan radikal dan apolitis terlihat mendirikan partai politik dan memasuki politik sebagai bagian dari demokrasi dan perjuangan ideologi dengan menggunakan jalur politik.

Karenanya parpol Islam sekuat apapun proses rekrutmen dan kaderisasi didalamnya jika tak melakukan revolusi pemikiran relasi Islam dan negara yang harus bisa beriringan maka perolehan suaranya tak akan mampu naik dari menengah kebawah, parpol Islam harus mulai melakukan rekrutment intelektual di perguruan tinggi serta memperkuat basis ulama di institusi kepakaran terkait seperti UIN dan MUI dan lainnya juga melakukan pendidikan politik yang diwujudkan dengan pendidikan yang kuat seperti sekolah tinggi Islam berkualitas yang gratis, sekolah di Al-Azhar gratis hingga jenjang Strata tiga (doktor).

Kekuatan Partai Politik Islam Sejak Tahun 1955

Indonesia yang mayoritas beragama Islam ternyata tidak memilih partai politik Islam sebagai pilihan politiknya, terlihat dari rendahnya suara partai politik Islam di era reformasi, pada pemilu 1999 partai politik yang berideologi Islam memperoleh sekitar 17 persen, pada pemilu 2004 partai politik Islam hanya memperoleh sekitar 15 persen dan pemilu pada 2009 kurang dari 15 persen, jika dibanding dengan partai nasionalis yang tidak berasaskan agama maka perolehan suara yang didapat partai-partai nasionalis ini lebih dari 50 persen seperti partai Demokrat dengan 25 persen, Golkar sekitar 15 persen dan PDIP sekitar 12 persen, walau pada pemilu pertama tahun 1955 partai politik Islam sempat menjadi partai yang disegani namun setelah itu, partai politik Islam hanya menjadi partai penggembira, kecil kebawah.

Mengapa umat Islam yang beragama Islam tidak memilih partai politik Islam sebagai pilihan politik mereka lalu memilih partai politik non ideologi Islam sebagai pilihan politik mereka. Bahkan ketika partai politik Islam mengangkat isu isu negara Islam dan penerapan syariat Islam, perolehan suaranya justru menurun seperti yang

¹¹ Luthfi Assyukanie, *Islam and the secular state in Indonesia*, 2009, ISEAS Publications, Singapore

terjadi pada PK (S), ketika menjadi partai Islam eksklusif dan ketat yang menyerukan kembali pada kemurnian Islam, ia hanya memperoleh 1,3 persen pada pemilu 1999 dan tidak lulus electoral threshold lalu berganti menjadi PKS, demikian juga dengan PBB pada pemilu 2009 ketika menyuarakan penerapan syariat Islam ia tidak lolos parliamentary threshold

Demikian juga dengan PPP ketika menyuarakan kembali ke piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam pada pemilu 2009 ia hanya memperoleh kurang dari 5 persen setelah sebelumnya memperoleh sekitar 10 juta suara, benarkah penurunan partai politik Islam dikarenakan menyuarakan isu-isu Islam seperti piagam Jakarta, pemberlakuan syariah Islam atau ada faktor lain dari penurunan partai politik Islam pra dan pasca reformasi? Inilah beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini nanti.

Asumsi awal penelitian ini adalah penurunan partai politik Islam di Indonesia karena adanya pengaruh sekularisasi yang begitu kuat terjadi di Indonesia, sekularisasi ini terjadi akibat dari pengaruh orde baru yang memarjinalkan Islam dengan politik dan intelektual Islam juga menyerukan suara yang sama seperti Nurkholis dan juga Gusdur, sehingga ketika keran reformasi terbuka maka suara Islam kemudian tidak ikut tereformasi untuk memilih partai politik Islam, berbeda dengan apa yang terjadi di Negara-negara Islam lainnya seperti Mesir dan juga Tunisia, ketika revolusi terbuka maka partai politik Islam menjadi pilihan politik umat Islam karena berhasil mempertahankan Islam memiliki relasi dengan Negara, berbeda dengan pemahaman sekuler yang agama tak memiliki relasi dengan Negara.

Beberapa penelitian yang telah ditulis tentang penurunan suara partai politik Islam era reformasi mengungkap beberapa sebab penurunan ini diantaranya adalah Bakhtiar Efendi yang menyebut penurunan partai politik Islam ini karena minimnya tokoh politik nasional yang mumpuni, tak ada solusi praktis Islam terhadap masalah-masalah politik dan ekonomi bangsa dan citra Islam yang selalu negatif seperti terorisme dan beberapa gerakan Islam nasional yang seolah anarkis seperti Laskar Jihad dan juga FPI.

Pada masa orde lama sebelum era demokrasi dipimpin diterapka Soekarno, Masyumi dan NU menjadi partai politik yang sangat kuat, pada pemilu 1955 Masyumi memperoleh 20 %, pemenang kedua setelah PNI diikuti oleh NU dengan 16 persen suara, namun setelah itu parpol Islam tak lagi mendapat tempat dipemilih Islam, ada dua penyebab utama, pertama Perpecahan internal dan kedua, factor

eksternal dengan hadirnya demokrasi terpimpin dan dibubarkannya Masyumi karena dianggap terlibat dalam gerakan seperatis di Sumatera Barat, dan diantara sebab internal adalah keluarnya partai pendukung utama Masyumi seperti PSII dan NU, PSII keluar karena tidak menginginkan Masyumi dinahkodai oleh kelompok sayap kiri yang menurut mereka tercermin dalam sosok Abu Hanifah, Natsir, Roem, Syafruddin dan Yusuf Wibisono¹²

Adapun NU keluar karena dua factor diantaranya Masyumi dinggap tidak memberikan wewenang yang layak bagi kalangan NU yang duduk di Majelis Syura, Majelis Syura dianggap sebagai pensehat saja, ide ini muncul dari kelompok Muhammadiyah, Kedua, NU tidak mendapat kursi menteri agama yang dimintanya ketika Kabinet Sukiman, utusan Masyumi Prawoto M dikirim surat dari Rais Am Majelis Syuriah NU KH Abdul Wahab Hasbullah¹³ NU kemudian mengambil jalur aman dengan merapat ke kubu Demokrasi terpimpin bahkan memberi gelar Soekarno sebagai *waliyul amri* atau pemimpin umat Islam dan mengakui NASAKOM, banyak alasan ideologis yang diungkap NU terkait sikap politiknya ini.

Pada era orde baru partai politik Islam tidak pernah mengungguli Golkar yang selalu mendapat suara mayoritas, Thaba menyebut ada tiga bentuk hubungan partai politik Islam dengan pemerintah yang berkuasa, pertama hubungan antagonistik antara tahun 1966-1981 dengan ditandai dengan banyak permintaan kelompok Islam yang ditolak orde baru seperti rehabilitasi Masyumi, pemberlakuan piagam Jakarta, pendirian partai politik Islam oleh Hatta, dan juga Muhammadiyah yang ingin mendirikan partai politik Islam.

Hubungan kedua, adalah hubungan Resiprokal Kritis 1982-1985 dengan mulai saling memahami posisi masing masing, pemerintah menawarkan asas tunggal bagi partai politik yang ada termasuk partai politik Islam lalu kemudian seluruh organisasi kemasyarakatan Islam termasuk NU dan juga Muhammadiyah, PPP menerima, Muhammadiyah dan NU juga menerima asas tunggal sebagai asas organisasi. Walau banyak reaksi yang muncul dari pemaksaan asas tunggal ini seperti kasus tanjung periok berdarah.

Hubungan ketiga, adalah hubungan akomodatif dengan diakomodasinya kepentingan kelompok Islam seperti terbentuknya ICMI, peningkatan kiprah yayasan amal bakti muslim Pancasila pimpinan Soeharto, pendirian Bank Muamalat, dan juga

¹² Islam dan Negara, Abdul Aziz Thaba, 1996, GIP, Jakarta

¹³ *Ibid hal 163*

pengiriman seribu da'I ke daerah daerah transmigrasi. Namun kekuatan partai politik Islam dengan ketiga hubungna ini tetap saja menjadi partai politik yang tidak memperoleh suara yang mampu menungguli Golkar.

Era reformasi kembali bergeliat namun masih diurutan bawah paling banter ke tengah, partai Islam kembali menyuarakan piagam Jakarta, penerapan syariah Islam namun ketika disuarakan Islam formal parpol Islam makin tak mendapat suara seperti PK dan PBB.

Sebab-Sebab Lemahnya Kekuatan Partai Politik Islam Indonesia

Diantara penyebab penurunan suara partai politik Islam menurut Bakhtiar Ali adalah pengaruh derita lama politik kelam partai politik Islam Indonesia dengan DI TII, kemudian Permesta membuat orang yang menyuarakan politik Islam jadi ketakutan ditambah dengan ketakutan Islam phobia dikalangan kelompok nasionalis

Penyebab kedua adalah sekularisasi, makin kuatnya arus pemisahan partai politik dengan Islam cultural, Luthfi Syaukanie mengungkap sebuah kajian betapa negara demokrasi Islam, negara demokrasi agama ternyata tidak diminati lagi oleh kaum muslimin Indonesia, dan justru yang diminati kaum muslimin Indonesia kini adalah faham menolak negara Islam, negara haruslah terpisah dari agama, ada banyak alasan yang dimuat Syaukanie dalam bukunya *Islam and the Secular State in Indonesia*¹⁴

Syaukanie dalam mendukung betapa faham menolak negara Islam kini menjadi pilihan alternative kaum muslimin Indonesia, Syaukanie mempertanyakan mengapa kaum muslimin Indonesia pada tahun 1930-an menolak gagasan nasionalisme namun 10 tahun kemudian menerima konsep nasionalisme ?, mengapa kaum muslimin pada tahun 1950-an menuntut pendirian negara Islam, namun 20 tahun kemudian menolak pendirian negara atas dasar ide negara Islam?, mengapa kaum muslimin pada tahun 1970- an menolak gagasan sekularisme namun 30 tahun kemudian kaum muslimin menerima konsep sekularisme ?

Analisa Syaukanie terhadap pertanyaan-pertanyaan awal diatas adalah telah terjadinya perkembangan sekaligus perubahan intelektual kaum muslimin Indonesia yang sangat drastis, sebab pada kurun waktu 1945 hingga 1970-an pemikiran politik

¹⁴ Luthfi Assyukanie, *Islam and the Secular State in Indonesia*, 2009, ISEAS Publications, Singapore

Islam dipenuhi dengan isu-isu ide pendirian negara Islam, namun kemudian isu dan ide ini kemudian luntur dan goyah, menurut Syaukanie isu dan ide pendirian negara Islam ini luntur karena ide tersebut hanya terbatas dan terjadi pada kalangan santri dan tidak terjadi pada kaum muslimin kalangan abangan sebagaimana Clifford Geertz memberikan tipologi kaum muslimin walau tipologinya ini mendapat bantahan dari kalangan akademis lainnya.

Kalangan santri inilah yang banyak berafiliasi pada partai politik tertentu sehingga memunculkan bergemuruhnya ide dan isu pendirian negara Islam, santri menurut Syaukanie jarang menolak ide pendirian negara Islam. Namun pada sekitar tahun 1970-an – 1980-an muncul sikap kritis terhadap pendirian negara Islam, sikap kritis ini tidak hanya muncul dari kalangan muslim abangan namun juga muncul dari kalangan muslim santri yang tadinya begitu mendukung ide pendirian negara Islam. Kekritisannya terhadap ide pendirian negara Islam ini tidak sama dengan semangat yang muncul di negara-negara Timur Tengah yang pada periode tahun ini sangat bersemangat pada seruan dan ide pendirian Negara Islam seperti yang terjadi di Aljazair, Turki dan juga Yordania.

Fakta yang diungkap Syaukanie ini ditambah dengan pengalaman partai politik yang berlandaskan Islam semakin menunjukkan kelesuan pemilihnya yang ditandai dengan penurunan perolehan suara pada pemilu-pemilu yang diselenggarakan pemerintah, misalkan pada tahun 1955 partai Islam memperoleh 43% suara menurun pada pemilu 1999, partai politik Islam hanya memperoleh 14% saja lalu pada pemilu 2004 hanya memperoleh 17% dari keseluruhan suara pemilih.

Kelesuan terhadap ide pendirian negara Islam ini juga terlihat dari isu tentang piagam Jakarta yang mulai mendapat tantangan dari kaum muslimin dan juga penerapan syariat Islam banyak ditolak oleh kalangan intelektual muslim, semua ini menandakan betapa menolak Negara Islam kini menjadi pilihan dikalangan kaum muslimin. Syaukanie menyebut bahwa ide menolak Negara Islam ini justru muncul dari kalangan santri. Syaukanie kemudian juga mengulas tipologi para intelektual nasional dan internasional tentang tipologi kaum muslimin Indonesia yang selalu menyebut ada kelompok yang mendukung paham menolak Negara Islam.

Tipologi pertama yang disebut Syaukanie adalah Clifford Geertz yang membagi kaum muslimin menjadi santri, abangan dan priyai, abangan menurut Syaukanie adalah kelompok yang tidak mendukung negara Islam, Deliar Noer juga membagi kaum muslimin menjadi modern dan tradisional, Syaukanie ingin menyebut

kaum muslimin modern adalah kelompok yang bisa menerima faham pemisahan negara dan agama berbeda dengan tradisional yang selalu mempertahankan tradisi Islam dalam membangun hubungan dengan masyarakat modernnya.

Allan juga membagi kaum muslimin menjadi Fundamentalis, Akomodasionis dan Reformis. Walaupun Fakhri Ali dan Bakhtiar Efendi menolak semua tipologi yang disebut dan lebih setuju membagi kaum muslimin menjadi empat tipologi, pertama Neo Modernis yang menjaga tradisi lama yang baik namun mengambil sikap modern jika ada nilai yang lebih positif dan lebih unggul (*al-muhafazah alal qadimis shalih wal alkhidzu bil jadidil ashlah*) kedua, sosial demokrat yang menyebut Islam adalah inspirasi bagi keadilan sosial dan ekonomi. Ketiga internasionalisme atau universalis Islam, Islam harus menjadi pemimpin dalam setiap aspek kehidupan manusia dan terakhir modernis dengan pemahaman Deliar Noer diatas.

Ada juga tipologi Mark R Wood Mark, ada muslim pribumi yang dalam tipologi Geertz disebut abangan yang berafiliasi politik ke PDIP, ada juga tradisional yang diwakili NU dengan PKB, lalu modernis Islam didalamnya ada PKB, PKS dan PBB. Terakhir ada neo modernis didalamnya ada Islam liberal inklusif dan toleran. Syaukanie melihat kelompok Islam liberal yang menolak gagasan negara Islam selalu ada dalam tiap tipologi dan cenderung mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat Indonesia.

Penyebab kedua adalah birokratisasi politik birokratisasi politik, yaitu campur tangan pemerintah dalam kebijakan politik, pemerintah tidak menerima simbol-simbol agama dalam partai politik seperti pada tahun 1968 Parmusi berdiri sebagian tokohnya ditolak oleh pemerintah karena berasal dari kader Masyumi, M. Hatta juga ingin mendirikan Partai Demokrasi Islam namun mendapat pertentangan dari pemerintah orde baru hingga akhirnya pemerintah melakukan kebijakan memfusi semua partai politik Islam yang melahirkan PPP pada tahun 1973¹⁵. Orde baru menjadi orde yang memarjinalkan Islam dipentas politik nasional, karenanya isu anti negara Islam menjadi sangat kuat.

Penyebab ketiga adalah budaya politik elit partai politik Islam yang tidak mencerminkan Islam itu sendiri seperti yang terjadi pada PPP yang pecah menjadi PBR dan konflik internal PBR setelah memisahkan diri dari PBB, korupsi ditubuh partai politik Islam juga terlihat, PBB antara Yusril dengan kubu Dewan Dakwah, hal

¹⁵ Islam Orde Baru, perubahan politik dan keagamaan, Sudirman Tebba, 1993, Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta

yang sama juga terjadi pada beberapa partai politik berbasis muslim sebagai konstetuenya.

Keempat, penyebab lemahnya partai politik Islam adalah ketiadaan solusi stabilitas politik dan ekonomi yang ditawarkan parpol Islam, karenanya tak ada perbedaan yang signifikan secara politik dan ekonomi jika partai politik Islam yang menang, parpol Islam tak mampu memberikan sesuatu yang baru dengan memberikan solusi ekonomi dan juga stabilitas politik dari kehadiran partai politik berideologi Islam.

Penyebab terakhir adalah Radikalisasi, banyaknya kasus radikal Islam yang terjadi di Indonesia membuat partai politik Islam menjadi sasaran empuk musuh politik lainnya untuk menyudutkan partai politik Islam, apalagi para teroris ini kerap kali menyuarakan penerapan syariat Islam dan juga keharusan mendirikan negara Islam Indonesia.

Penutup

Jika melihat teori Ware tentang partai politik maka partai politik Islam di Indonesia masih belum memiliki kekuatan eksternal yang kuat, sebab banyak partai politik Islam yang hanya mengandalkan elitnya dalam penentuan kader-kader yang akan maju baik sebagai pemimpin ataupun anggota dewan, budaya demokrasi partai politik Islam Indonesia dengan mengacu pada Ware masih sangat rendah dan terkesan tak ada fungsi partai politik yang dijalankan dengan baik, terlihat dari banyaknya kader parpol Islam ini yang tiba-tiba duduk di jajaran atas dan terdepan tanpa mengawali proses kaderisasi yang kuat. Sehingga banyak anggota nya pindah melompat kepartai lain seperti Ali Mukhtar Ngabalin yang ke Golkar atau Gubernur NTB terpilih Tuan Guru Bajang yang awalnya mewakili dan maju dengan mewakili parpol Islam yaitu PBB dan PKS dan setelah menjadi Gubernur pindah ke Demokrat sekaligus menjafi ketua wilayah NTB.

Secara eksternal sebagai faktor kekalahan partai politik Islam Indonesia adalah belum sempurnanya system pemilihan umum yang tak jujur adil dan rahasia, pemerintah sebagai penyelenggara pemilu masih melakukan kecurangan-kecurangan sistematis dan terstruktur yang membuat partai politik masih sangat rentan terkena lemah

Kekuatan partai politik Islam Indonesia masih sangat kecil dan hanya mampu melakukan pertarungan politik pada era orde lama ketika Masyumi dan NU menjadi

partai politik yang cukup kuat, namun setelah itu kekuatan partai-partai Islam melemah dan hampir menghilang hingga masa reformasi datang dan kini mulai menggeliat walau masih tertatih-tatih parpol Islam kini harus lebih kuat dan massif melakukan sosialisasi politik sebab terbukti Islam kuat secara spiritual tak relevan dengan pilihan muslim terhadap partai politik ideologi Islam jika budaya politik elit terlihat sama, tak ada solusi Islam yang ditawarkan untuk membawa rakyat menjadi makmur dan tegaknya hukum di negara.

Daftar Pustaka

Assyukanie, Luthfi. 2009. *Islam and the Secular State in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publications

Budiarjo, Miriam. 1980. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Penerbit Obor

Khairiah, Sri Zul. 2008. *Dominasi Golkar dan LDP di Indonesia dan Jepang*. Depok: Fisip UI

Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat*. Jakarta: Gramedia

Romli, Lili. 2006. *Islam Yes, Partai Islam Yes*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tebba, Sudirman. 1993. *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press

Ware, Alan. 1977. *Political Party and Political System*. Oxford:

Sumber lain

Romli, Lili. 2001. *Partai Politik Islam di era Reformasi dan piagam Jakarta dalam Sidang tahunan MPR 2000*. Tesis Universitas Indonesia

Zoelva, Hamdan. 2003. *Partai Politik Islam dalam Peta Politik Indonesia*. Makalah di The International Institute of Islamic Thought (IIIT) 17 April 2003